

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Politik dalam Administrasi Publik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Sedangkan menurut aristoteles dan plato, politik adalah usaha dalam mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Menurut Budiardjo (2008:5), politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh warga karena membawa kearah kehidupan yang harmonis. Selain itu, terdapat bentuk paling buruk dari politik menurut Peter Merkl dikutip oleh Budiardjo (2008:16), politik merupakan suatu perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri sehingga politik lebih dekat dengan konflik dan konsensus. Berbeda dengan Rod Hague, pandangan politik menurut Rod Hague (1998) dalam Budiardjo (2008:16) lebih memandang politik dalam artian yang lebih positif, “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya”. Selanjutnya, Andrew Heywood (1997) dikutip oleh Budiardjo (2008:16) “politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamademen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupan”. Dari pengertian politik oleh kedua tokoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik merupakan suatu bentuk dalam mengatur masyarakat melalui peraturan-peraturan guna membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. adapun konsep pokok

berdasarkan pengertian politik di atas maka politik terdiri dari: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi.

Perkembangan politik yang semakin maju sehingga semakin berkembangnya studi atau kajian tentang politik, yang pada akhirnya melahirkan teori tentang politik. Adapun pengertian tentang teori politik menurut Budiardjo (2008:43), yaitu: “Teori politik adalah bahasan dan renungan atas: 1) tujuan dari kegiatan politik, 2) cara-cara mencapai tujuan politik itu, 3) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan 4) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu”. Dari pengertian tentang teori politik tersebut maka terdapat konsep dari teori politik antara lain: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, dan modernisasi (Budiardjo, 2008:43).

Secara epistemologis menurut Ritzer (2005), administrasi publik dalam paradigma *New Public Services* (NPS) berakar dari filsafat politik tentang demokrasi. Pendekatan politik dalam administrasi negara oleh Denhardt dan Denhardt (2007) menspesifikasikannya menjadi demokrasi kewargaan. Demokrasi merupakan suatu paham pemerintahan yang berdasarkan pada aturan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam konteks demokrasi kewargaan, demokrasi dalam hal ini dimaknai sebagai pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Warga negara memiliki hak penuh memperoleh perhatian dari pemerintah dan warga negara berhak terlibat dalam setiap proses pemerintahan (politik dan pengambilan

kebijakan). Denhardt dan Denhardt (2007) menurut Ritzer (2005) telah berhasil mencari akar mengapa pemerintah harus melayani (*serve*) bukan mengarahkan (*steer*), mengapa pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara (*citizens*) bukan sebagai pelanggan (*customers*), tetapi mereka lupa bahwa nalar politik telah masuk dalam upaya pencarian *state of the art* administrasi negara melalui pelayanan publik. Selain itu, Denhardt dan Denhardt (2007) telah menganggap administrasi negara sebagai ilmu politik dimanan perumusan *New Public Service* (NPS) sebagai antitesa terhadap *New Public Management* (NPM). Sehingga berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan politik dalam administrasi publik adalah pemerintahan yang menerapkan nilai demokrasi dimana pemerintah bertanggung-jawab melayani masyarakat sebagai warga negara karena pada awalnya warga negaralah yang mendirikan negara dan kemudian menjalankannya serta terikat dengan aturan-aturan negara. Oleh karena itu, secara etika dan moral warga negara adalah pemilik negara. Selain itu, pendekatan politik dalam administrasi publik juga menekankan hak dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik yaitu berpartisipasi dalam pemerintahan, menyalurkan pendapat dalam pemerintahan, ikut serta dalam pemilihan umum, dan dapat memberikan hak suara dalam pemilihan umum.

B. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik di negara demokrasi merupakan sebagai wujud dari paham tentang kedaulatan ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan

yang dilakukan bersama untuk menetapkan tujuan masa depan masyarakat dan menentukan pemimpin dalam masyarakat tersebut. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses politik seperti pemberian suara (pemilihan umum), menyalurkan pendapat, ikut dalam kegiatan-kegiatan dalam politik. Partisipasi politik masyarakat yang tinggi maka menggambarkan masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik atau masalah kenegaraan yang terjadi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut (Budiardjo, 2008:367).

Partisipasi politik setiap masyarakat berbeda-beda mulai tingkatan apatis (tidak mau ikut serta dalam politik) hingga aktif dalam politik. Sehingga, Michael Rush dan Philip Althof (1983:117-118) membagi partisipasi politik sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
7. Partisipasi dalam rapat umum dan demonstrasi
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
9. *Voting* (pemberian suara)

Hierarki diatas menurut Althoff (1983:118-119) tingkatan mulai yang tingkatan pertama merupakan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan dalam sistem politik maupun anggota birokrasi. Setiap pertimbangan dari para pemegang jabatan harus mengandung pertimbangan dari orang-orang yang berkepentingan dan mencari jabatan di kantor bersangkutan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam berjalannya pemerintahan. Setelah pencari jabatan, terdapat orang yang menjadi anggota organisasi politik atau semu politik. Pada

tingkatan ini terdapat partai politik dan kelompok kepentingan dimana keduanya merupakan agen mobilisasi politik. Pada kelompok kepentingan merupakan organisasi yang bertujuan untuk memajukan, mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap yang terbatas sesuai dengan kepentingan bersangkutan. Sedangkan, partai politik lebih kepada memajukan, mempertahankan atau mewakili cakupan yang lebih luas daripada kelompok kepentingan.

Partisipasi seseorang dalam partai politik atau kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif. Partisipasi aktif bila orang tersebut menduduki jabatan pada organisasi politik tersebut, memberikan dukungan keuangan, atau membayar iuran rutin anggota. Partisipasi yang bersifat pasif bilamana seorang tersebut tidak menduduki jabatan dan tidak memberikan dukungan keuangan atau tidak membayar iuran keanggotaan tetapi seseorang tersebut aktif dalam mendukung kemajuan organisasi politik tersebut (Maran, 2007:150).

Bentuk partisipasi dalam mengikuti rapat demonstrasi menurut Maran (2007:150-151) merupakan acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik yang bersifat spontan tetapi seringkali terorganisir oleh organisasi politik tersebut dan merupakan agenda politik organisasi politik tersebut. Partisipasi ini biasanya bukan atas kesadaran sendiri melainkan dimobilisasi oleh organisasi politik tersebut. Selanjutnya partisipasi politik dalam diskusi politik secara informal yang dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Biasanya diskusi tersebut berlangsung menarik karena adanya hubungan persahabatan atau kekeluargaan antara peserta diskusi.

Partisipasi politik terakhir adalah partisipasi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam pemilihan wakil masyarakat atau pemimpin masyarakat. Selain itu, diantara masyarakat yang ikut dalam partisipasi politik terdapat juga masyarakat yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Sifat apatis biasanya dikarenakan sikap seorang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap gejala-gejala pada masyarakat, anggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, ketidakpercayaan pada politisi dan ketidakpercayaan kepada pejabat (Maran, 2007:151).

Selain itu, menurut Milbrath dan Goel dikutip oleh Budiardjo (2008:372) partisipasi politik di masyarakat amerika dibagi dalam tiga kategori antara lain:

1. Pemain (*Gladiators*)
5-7% populasi termasuk *gladiators*, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
2. Penonton (*Spectators*)
60% populasi termasuk *spectators*, yaitu aktif secara minimal termasuk menggunakan hak pilihnya.
3. Apatitis (*Apathethics*)
33% populasi termasuk *apathethics*, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Penjabaran terkait partisipasi politik di atas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwan partisipasi politik dapat berupa memberikan suara dalam pemilihan umum dimana menurut Milbrath dan Goel dikutip oleh Budiardjo (2008:372) masuk dalam kelompok Penonton (*Spectators*).

C. Konsep Pemilihan Umum

Dalam negara demokrasi pelibatan rakyat menjadi titik penting sebagai ukuran keberhasilan dari terselenggaranya demokrasi di negara tersebut. Hal

tersebut juga diutarakan oleh Gaffar (2013:35) bahwa inti dari demokrasi adalah dengan adanya pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan dari masyarakat. Sehingga, N.D Arora dan S.S. Awasthy dikutip dalam buku Gaffar (2013:35) mengungkapkan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemerintah yang dipilih oleh rakyat atau perwakilan dari rakyat dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat sebagai yang diperintah. Selain itu, sebagai negara hukum menurut Asshiddiqie (2010) dikutip dalam buku Gaffar (2013:35-36) bahwa indeks pengukuran terselenggaranya hukum yang demokratis adalah adanya pemilihan umum pada lembaga yang dipilih oleh rakyat.

Posisi pemilu dalam pemerintahan menurut Rudolf Mellinghoff dikutip dalam buku Gaffar (2013:37) adalah sebagai mekanisme transfer kekuasaan dari rakyat kepada pejabat negara dan sebagai pemberi legitimasi terhadap pemerintahan. Karena posisi pemilu yang penting maka penyelenggaraan pemilu harus terselenggara dengan baik. Agar pemilu terselenggara dengan baik maka penyelenggaraan pemilu harus memenuhi beberapa prinsip yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Eric Barendt (1998) dikutip dalam buku Gaffar (2013:41) bahwa terdapat empat prinsip pemilu agar terselenggara dengan baik dan ditetapkan dalam regulasi yaitu berkala (*regular*), bebas (*free*), persamaan (*equal*), dan rahasia (*secret*). Selain itu, berdasarkan *Universal Declaration on Democracy* terdapat beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu bebas, adil, berkala, umum, persamaan, dan rahasia serta harus ada penghormatan terhadap hak untuk dipilih dan memilih, kebebasan berekspresi dan

berkumpul, akses terhadap informasi, dan kebebasan berorganisasi. Prinsip-prinsip pemilu tersebut harus ada dalam 10 komponen dari pemilu yang demokratis yaitu sistem pemilu, pengaturan distrik, administrasi pemilu, hak pilih dan pendaftaran pemilu, pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih, kandidat, partai politik dan pendanaan kampanye, akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi pada kampanye, pemungutan suara, pemantauan pemilu, dan penyelesaian perkara pemilu (Gaffar, 2013:42-44).

Pemilihan umum di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, “pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas penyelenggara pemilu di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, yaitu: 1. mandiri, 2. Jujur, 3. Adil, 4. kepastian hukum, 5. Tertib, 6. kepentingan umum, 7. keterbukaan, 8. proporsionalitas, 9. profesionalitas; 10. Akuntabilitas, 11. Efisiensi, dan 12. efektivitas. Pemilu di Indonesia terbagi atas Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh

rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis (undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum). Terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis adalah tergantung dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta di dalam partisipasi tersebut hal yang terpenting adalah perilaku pemilih masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sehingga perlunya juga pengkajian tentang perilaku pemilih masyarakat karena dari kajian tersebut akan diketahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam pemilihan umum.

D. Pendekatan Perilaku Pemilih

Pemilihan umum (pemilu) yang berhasil atau terselenggara dengan baik adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam pemilu terkadang disebabkan beberapa hal dimana faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dipelajari dalam kajian perilaku pemilih (*voting behavior*). Menurut Downs (1957) dikutip dalam buku Firmanzah (2012:87-88) perilaku memilih dapat dianalogikan dengan perilaku pembeli dalam dunia bisnis akan tetapi bila dalam perilaku pembeli jika terjadi keputusan pembelian yang salah maka akan berdampak langsung kepada subyeknya. Sedangkan, dalam perilaku pemilih dalam pemilu, keputusan pemilihan yang salah tidak berdampak langsung terhadap subyeknya karena keputusan individu tidak berarti apa-apa kecuali dalam jumlah yang besar.

Faktor yang mempengaruhi perilaku Pemilih menurut Schumpeter (1966) dikutip dalam buku Firmanzah (2012:88-89) adalah faktor seberapa besar pemilih

mendapatkan informasi terkait partai politik atau kandidat bersangkutan. Brennan dan Lomasky (1977) dikutip dalam buku Firmanzah (2012:89-90) mengatahkan perilaku pemilih dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi antara pemilih dengan kandidat terkait. Loyalitas yang dimaksud adalah kandidat akan mendapatkan loyalitas jika kandidat tersebut loyal kepada pemilih yaitu terkait konsistensi janji dan harapan yang mereka berikan kepada pemilih apakah dapat terimplementasikan saat terpilih. Terkait ideologi adalah masyarakat akan memilih jika adanya kesamaan ideologi dengan kandidat atau partai politik terkait.

Menurut Adman Nursal (2004) dikutip oleh Puspasari (2012:39-40) terdapat beberapa pendekatan dalam melihat perilaku pemilih, yaitu

1. Pendekatan Sosiologis (Mahzab Columbia)
Menurut mahzab columbia pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dapat memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.
2. Pendekatan Psikologis
Mahzab Michigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi.
3. Pendekatan Rasional
Pemilih yang dapat melakukan penilaian secara valid atas tawaran yang disampaikan oleh kandidat. Selain itu, pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan dalam pengambilan keputusan memilih bukan pada faktor kebetulan atau kebiasaan dan bukan kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan logis.
4. Pendekatan Marketing
Newman dan Sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- a) Isu dan kebijakan politik
Mempresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
- b) Citra sosial
Adalah citra kandidat dalam pikiran pemilih mengenai berada kondisi sosial tertentu yang dianggap baik bagi pemilih.
- c) Perasaan emosional
Adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
- d) Citra Kandidat
Mengenai pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
- e) Peristiwa Mutakhir
Mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- f) Peristiwa personal
Mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seseorang kandidat.
- g) Faktor-faktor epistemik
Adalah isu-isu pemilihan spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Guna memperdalam tentang empat pendekatan tersebut maka berikut penjabaran dari empat pendekatan tersebut:

- a) Pendekatan Sosiologis

Pada pendekatan sosiologis, struktur tertentu atau mempunyai kondisi sosial tertentu akan mengakibatkan perilaku tertentu. Kondisi yang sama juga terjadi antara anggota lainnya karena sepanjang hidup mereka dipengaruhi lingkungan fisik dan sosial-budaya yang yang relatif sama dan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang sama sehingga mereka memiliki kepercayaan nilai dan harapan yang juga relatif sama, termasuk dalam kaitannya dengan preferensi politik. Pada pendekatan sosiologis para anggota subkultur yang sama

cenderung mempunyai preferensi yang sama pula (Sholihin, 2009:23). Dari pengertian pendekatan sosiologis oleh Sholihin (2009:23) di atas, maka dapat dijabarkan bahwa perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis menekankan pada pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Adapun menurut Nasution (2009:31-32) menyebutkan bahwa pendekatan sosiologis pada dasarnya menekankan pada karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial. Karakteristik sosial terdiri atas pekerjaan dan pendidikan. sedangkan karakteristik atau latar belakang sosiologis terdiri atas agama, wilayah, jenis kelamin, dan umur. Dari karakteristik tersebut maka akan mempengaruhi pembentukan kelompok sosial secara formal seperti keanggotaan seorang dalam keagamaan dan organisasi profesi, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, atau kelompok-kelompok kecil lainnya.

b) Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis lebih menekankan pada faktor sikap dan sosialisasi yang mempengaruhi perilaku pemilih. Menurut Rabbani (2013:29-30) konsep sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih, terdapat 3 (tiga) fungsi sikap yaitu:

- 1) Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.
- 2) Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya.

- 3) Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (*defense mechanism*).

Sikap seseorang akan menjadi lebih yakin ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok yang menjadi acuannya seperti kelompok atau perkumpulan teman pekerjaan, kelompok warga sekitar tempat tinggal, kelompok keagamaan dan lain sebagainya. Proses sosialisasi tersebut kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan kandidat atau partai politik bersangkutan. Sehingga menurut Sholihin (2009:23-24), pendekatan psikologis menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Sehingga perilaku pemilih pada pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

c) Pendekatan Rasional

Pada pendekatan rasional para pemilih memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan, melainkan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan dan pikiran yang logis. Menurut Sholihin (2009:25) pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan

berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan dan terkadang didasarkan pada jabatan, informasi, dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimiliki kandidat atau partai bersangkutan.

Selain itu Pendekatan rasional juga dapat disebut juga dengan pendekatan *Rasional Choice*, dimana menurut Anthony Downs (1957) dalam Rabbani (2013: 35) adalah:

Pendekatan rasional melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya dipengaruhi oleh dua hal, yakni orientasi isu dan kandidat (figur). Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang harus dan sebaiknya dilakukan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit dalam Rabbani (2013:34) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, maupun faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya. Menurut Situngkir (2004) dikutip oleh Sholihin (2009: 26) pendekatan rasional dilandasi oleh asas manfaat yang akan diperoleh pemilih. Sehingga terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemilih rasional, yaitu:

- 1) Kalkulasi keuntungan total yang diperoleh untuk masing-masing kemenangan kandidat bagi agen pemilih.
- 2) Membuat urutan kandidat yang paling menguntungkan hingga yang paling tidak menguntungkan.
- 3) Menentukan pilihan pada yang paling menguntungkan.

Setelah melalui tahapan tersebut, maka pemilih akan yakin untuk memilih calon kandidat yang telah dianalisis dengan tiga tahapan tersebut. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa kandidat atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih sehingga mengarahkan masyarakat untuk melakukan pilihan berdasarkan perhitungan rasional tentang keuntungan atau kerugian yang bakal diperoleh.

d) Pendekatan Marketing

Pendekatan marketing lebih memandang keberhasilan kandidat atau partai terkait dilihat dari keberhasilan dalam mengenalkan kandidat atau partai politik terkait kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan tertarik terhadap visi-misi serta program-program yang akan dilakukan kandidat atau partai politik tersebut. Menurut Wibowo (2005) memahami peluang kandidat dalam pemilihan umum sama halnya dengan bagaimana memahami politik marketing, dimana setiap produsen mempunyai kesempatan yang sama dalam memasarkan produk (dalam pemilihan umum adalah kandidat terkait) sesuai dengan keinginannya. Produk (kandidat) yang mampu bersaing dan memenangkan peperangan adalah produk (kandidat) yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan,

memenuhi keinginan pasar serta memenuhi harapan dari pasar (pasar dalam hal ini adalah masyarakat/pemilih).

Pada pendekatan marketing hal-hal yang perlu diperhatikan partai politik atau kandidat dalam pemilihan umum menurut Wibowo (2005) dikutip dalam jurnal tulisan Sudaryanti (2005: 207), yaitu:

1. Pertama, isu dan kebijakan politik, yang merupakan presensi dari kebijakan atau program yang akan dilaksanakan oleh para kandidat (calon) Kepala Daerah nanti. Dengan demikian pemilih akan tahu apa yang akan dikerjakan kandidat tersebut, misalnya seberapa besar keberanian kandidat mengikuti debat publik untuk menyampaikan visi dan misinya.
2. Kedua, citra sosial, menunjukkan stereotipe (citra) kandidat dalam menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi-asosiasi tertentu sehingga akan terjadi segmentasi pemilih dimana kandidat dapat diterima. Misalnya calon yang berasal dari kalangan intrepeneur, sudah barang tentu akan lebih mudah diterima oleh kelompok usahawan. Partai yang berbasis agama tidak akan begitu mudah menerima calon dari non agama.
3. Ketiga, perasaan emosional, merupakan platform yang ditawarkan oleh kandidat kepada pemilihnya. Misalnya kandidat calon Walikota Surakarta yang mencoba akan membenahi pedagang kaki lima, tentu akan memunculkan perasaan emosional dari masing-masing pemilih. Ada yang simpati dan ada yang antipati.
4. Keempat, citra kandidat, merupakan konsistensi citra diri seorang kandidat. Ketegasan, emosional yang stabil, energik, jujur dan sebagainya akan menjadi acuan bagi pemilih nanti. Misalnya bagi kandidat yang berasal dari bekas pejabat yang pada saat berkuasa terlibat korupsi, akan menjadi catatan bagi para pemilihnya. Terakhir, rasionalitas pemilih. Adanya perubahan perilaku pemilih yang menjadi lebih rasional menjadi pertimbangan penting bagi para kandidat dalam mempersiapkan dirinya dan tim suksesnya.

Firmanzah (2012:113-114) dalam melihat perilaku pemilih adalah dengan membagi tipologi pemilih menjadi dua orientasi berdasarkan pandangan pemilih yang objektif dan subjektif, yaitu:

Dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu orientasi *policy problem solving* dan orientasi ideologi. Ketika pemilih menilai partai politik atau kontestan dari kacamata orientasi *policy problem solving*, yang terpenting bagi pemilih adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan ideologi akan lebih menekankan aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, moralitas, norma, emosi dan psikografis.

Lebih lanjut, Firmanzah (2012:114-118) menguraikan dua orientasi pemilih di atas menjadi tiga faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu kondisi awal pemilih, media massa, dan partai politik atau kontestan. Kondisi awal pemilih diartikan karakteristik yang melekat pada diri pemilih. Setiap pemilih memiliki sistem nilai serta kepercayaan yang berbeda. Dalam kondisi awal pemilih terdiri dari: pertama, sosial budaya pemilih yaitu perilaku pemilih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar seperti keluarga, kondisi geografis seperti daerah desa dan perkotaan. Kedua, nilai tradisional pemilih yaitu nilai-nilai yang terkandung pada lingkungan pemilih. Ketiga, tingkat pendidikan dan ekonomi pemilih yaitu individu yang tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi akan cenderung menggunakan aspek nonrasional dalam pengambilan keputusan seperti faktor rumor, isu, stereotipe, dan pendapat umum. Sedangkan, yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengambil

keputusan dan memverifikasi informasi-informasi yang masuk. Faktor kedua adalah faktor media massa yaitu kemampuan media massa mendistribusikan informasi dalam membentuk opini publik sehingga dapat mempengaruhi pandangan positif atau negatif pada partai politik bersangkutan. Faktor ketiga adalah karakteristik partai politik dan kontestan yaitu terkait atribut kontestan seperti reputasi, image, citra, latar belakang, ideologi, dan kualitas dari kontestan atau partai politik terkait akan mempengaruhi penilaian masyarakat atas partai politik bersangkutan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional, pendekatan marketing. Dari keempat pendekatan tersebut nantinya akan dipilah kembali faktor-faktor mana saja yang termasuk dalam kategori pemilih berorientasi pada *policy problem solving* dan yang berorientasi pada ideologi. berikut faktor-faktor dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Sosiologis

- a) Faktor usia calon legislatif
- b) Faktor latar belakang pekerjaan calon legislatif sebelumnya
- c) Faktor tingkat pendidikan calon legislatif
- d) Faktor kesamaan agama dengan kandidat
- e) Dorongan atau satu pemikiran dengan keluarga
- f) Dipengaruhi atau disarankan teman
- g) Kandidat masih keluarga atau masih kerabat

- h) Kandidat berasal dari daerah yang sama dengan pemilih
- i) Tergabung dalam komunitas atau organisasi yang satu pemikiran dengan partai politik atau kandidat dalam pemilu
- j) Tergabung dalam organisasi politik seperti kelompok kepentingan dan partai politik

2. Pendekatan Psikologis

- a) Kualitas Kandidat dari segi pengalaman, pendidikan, kemampuan memecahkan masalah yang ada, dll
- b) Kualitas Partai politik yang mempunyai kredibilitas baik atau partai politik dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
- c) Kandidat atau partai politik saat menjabat dianggap telah menjalankan tugas dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Rasional

- a) Kesesuaian Visi-Misi kandidat dengan harapan pemilih atau visi-misi kandidat dianggap dapat mengatasi permasalahan yang ada
- b) Memilih kandidat karena kandidat telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih
- c) Janji atau program atau kebijakan yang akan dilaksanakan kandidat jika terpilih memberikan manfaat bagi pemilih maupun lingkungan pemilih.

4. Pendekatan Marketing

- a) Kandidat adalah tokoh masyarakat, orang yang berjasa kepada masyarakat, pemuka agama, tokoh nasional, dll

- b) Kandidat memiliki citra yang baik di mata pemilih karena pemberitaan di media massa dan isu yang berkembang

E. Konfigurasi Perilaku Pemilih

Kategori pemilih dalam Firmanzah (2012:119-126) menyebutkan bahwa menentukan kategori pemilih melalui pertimbangan kedekatan antara dua variabel yaitu *policy problem solving* yang menekankan pada aspek kognitif dan variabel ideologi yang lebih menekankan pada aspek afektif serta emosi. Dari kedua variabel tersebut maka berikut empat kategori pemilih:

1. Pemilih Rasional

Pada pemilih rasional, pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving* dan berorientasi rendah pada faktor ideologi. pemilih lebih mengutamakan melihat kemampuan partai politik atau calon kandidat dalam program kerjanya. Program kerja atau *platform* partai bisa dilihat dari kinerja partai masa lampau dan tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikografis dipertimbangkan juga tetapi tidak terlalu signifikan. Analisis kognitif dan pertimbangan logis sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang

bersifat ideologis. Proses untuk menjadi pemilih pada jenis ini terjadi dua kemungkinan yaitu pemilih menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kemungkinan kedua adalah pemilih tertarik dahulu pada program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan setelah itu mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau calon kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan nilai sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau calon kontestan. Biasanya jenis pemilih tradisional lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos, dan nilai historis sebuah partai politik atau calon kontestan. Karakteristik mendasar jenis pemilih tradisional adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

4. Pemilih Skeptis

Pada jenis pemilih ini, pemilih tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau calon kandidat serta tidak

menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat pada partai politik rendah karena memiliki ikatan ideologi yang rendah. Pemilih juga kurang memperdulikan *platform* dan kebijakan sebuah partai politik atau calon kontestan.

F. Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai tema penelitian ini yaitu analisis perilaku pemilih dalam pemilihan umum yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Penelitian Sebelumnya Mengenai Perilaku Pemilih

NO	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marlini Tarigan	2009	Partisipasi politik masyarakat kabupaten temanggung dalam pelaksanaan pilkada tahun 2008	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan hasil terdapat pengaruh atau hubungan positif antara popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2	Fera Hariani Nasution	2009	Perilaku pemilih pada pemilihan gubernur Sumatera Utara secara langsung	Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh isu suku, agama, ras dan politik uang dalam menentukan pilihan pada pemilukada sumatera utara 2008. Sedangkan

			di Kabupaten Labuhan Batu (studi kasus: di Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu)	faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan pilihan terhadap calon kepala daerah adalah media kampanye berupa TV, spanduk, baliho, dan stiker serta faktor figur calon melalui visi dan misi calon.
3	Mohammd Sholihin	2009	Perilkaku pemilih buruh rokok dalam pilkada langsung di Kabupaten Kudus	Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok pada pilkada Kudus antara lain: pertama faktor juru kampanye atau tim sukses atau sabet, Faktor kedua adalah insentif atau hibah politik atau apapun namanya, Faktor ketiga adalah identifikasi calon, mereka akan memilih calon yang menurut kabar perilakunya baik dan mau turun dan berkunjung ke lingkungan masyarakat bawah, Faktor keempat adalah isu kampanye atau visi misi calon, Faktor kelima adalah identifikasi partai, dan Faktor keenam adalah kelompok penekan.
4	Sudaryanti	2008	Analisis tentang perilaku pemilih pada Pilkada tahun 2005 di Surakarta (studi deskriptif tentang	Hasil penelitian ini adalah faktor media massa dan komunikasi interpersonal dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang pasangan kandidat yang dicalonkan, isu-isu/ program

			perilaku PNS pemerintah Kota Surakarta dalam Pilkada tahun 2005 di Surakarta)	politiknya, dan partai politik yang mencalonkannya.
5	Muhammd Rabbani	2013	Fenomena golongan putih di kota makassar pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi sulawesi selatan 2013	Hasil penelitian ini adalah Di lokasi penelitian di kecamatan Tamalanrea ditemukan dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya antara lain: pertama, yaitu kategori masyarakat golput pragmatis karena mereka apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilu. Sedangkan yang kedua yaitu sebagian masyarakat golput politis merupakan masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber, 2014

Adapun posisi penelitian ini dengan merujuk pada hasil penelitian pada tabel 1 adalah pertama, melihat kecenderungan perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan menggambarkan faktot-faktor yang paling mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat. Kedua, menyimpulkan jenis pemilih pada masyarakat Kabupaten Bojonegoro dengan merujuk kecenderungan perilaku pemilih pada Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

G. Alur Pikir Penelitian

Adapun alur pikir dari penelitian ini adalah pertama yaitu menganalisis pendekatan-pendekatan dalam perilaku pemilih. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologis, psikologis, rasional, dan marketing. Dari keempat pendekatan tersebut selanjutnya peneliti menguraikan pendekatan tersebut menjadi lima variabel yaitu variabel karakteristik dan pengelompokan sosial kualitas kandidat, kesesuaian visi dan misi serta program kandidat, kontribusi yang telah diberikan kandidat, dan citra kandidat atau partai politik. Selanjutnya ketujuh variabel tersebut diuraikan menjadi item pertanyaan bagi responden. Dari seluruh item-item pada variabel akan di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemilih yang berorientasi pada *policy problem solving* dan kelompok pemilih yang berorientasi pada ideologi. Adapun item-item yang masuk dalam kelompok pemilih yang berorientasi pada *policy problem solving* dan kelompok pemilih yang berorientasi pada ideologi antara lain:

1. kelompok pemilih yang berorientasi pada *policy problem solving*:
 - a. faktor usia kandidat,
 - b. faktor tingkat pendidikan kandidat,
 - c. Latar belakang pekerjaan kandidat sebelumnya,
 - d. pengalaman dan kemampuan kandidat dalam memecahkan masalah yang ada dan dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan saat ini dan kedepannya,

- e. Kualitas Partai politik yang mempunyai kredibilitas baik atau partai politik dianggap mampu menyelesaikan permasalahan saat ini dan kedepannya,
 - f. Kandidat atau partai politik saat menjabat dianggap telah menjalankan tugas dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada,
 - g. Kesesuaian visi-misi kandidat dengan harapan pemilih atau visi-misi kandidat dianggap dapat mengatasi permasalahan yang ada,
 - h. Janji calon legislatif terkait program/kebijakan yang akan dilaksanakan kandidat jika terpilih.
2. kelompok pemilih yang berorientasi pada ideologi
- a. Faktor kesamaan agama dengan kandidat atau partai politik,
 - b. Kandidat berasal dari daerah yang sama dengan pemilih,
 - c. Dorongan atau satu pemikiran dengan keluarga dalam memilih kandidat,
 - d. Dipengaruhi atau mengikuti teman dalam memilih kandidat,
 - e. Kandidat masih keluarga atau kerabat dengan pemilih,
 - f. Tergabung dalam komunitas atau organisasi yang satu pemikiran dengan partai politik atau kandidat dalam pemilu
 - g. Tergabung dalam organisasi politik seperti kelompok kepentingan atau partai politik
 - h. Bentuk kampanye kandidat atau partai politik terkait yang dapat meyakinkan pemilih,
 - i. Kandidat adalah tokoh masyarakat atau orang yang berjasa kepada masyarakat

- j. Memilih kandidat karena kandidat telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih.

Setelah pengelompokan tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan data di lapangan. Setelah pengambilan data selanjutnya pada analisis data akan dilihat rata-rata jawaban responden setiap item dan melihat item mana yang mempunyai rata-rata tertinggi yang merupakan gambaran kecenderungan perilaku pemilih di masyarakat. Setelah mengetahui kecenderungan perilaku pemilih masyarakat berdasarkan item yang mempunyai rata-rata tertinggi selanjutnya yaitu penyimpulan kategori jenis perilaku pemilih pada masyarakat. Untuk lebih rincinya berikut penjabaran terkait pertimbangan kategori jenis perilaku pemilih:

1. Pemilih Rasional

Item-item yang menjadi pertimbangan dalam kategori jenis perilaku pemilih rasional adalah item dengan rata-rata tertinggi dengan item tertinggi tersebut termasuk dalam kelompok kelompok pemilih yang berorientasi pada *policy problem solving*.

2. Pemilih Kritis

Item-item yang menjadi pertimbangan dalam kategori jenis perilaku pemilih kritis adalah item dengan rata-rata tertinggi dengan item tertinggi tersebut masuk dalam kelompok pemilih yang berorientasi pada *policy problem solving* dan kelompok pemilih yang berorientasi pada ideologi.

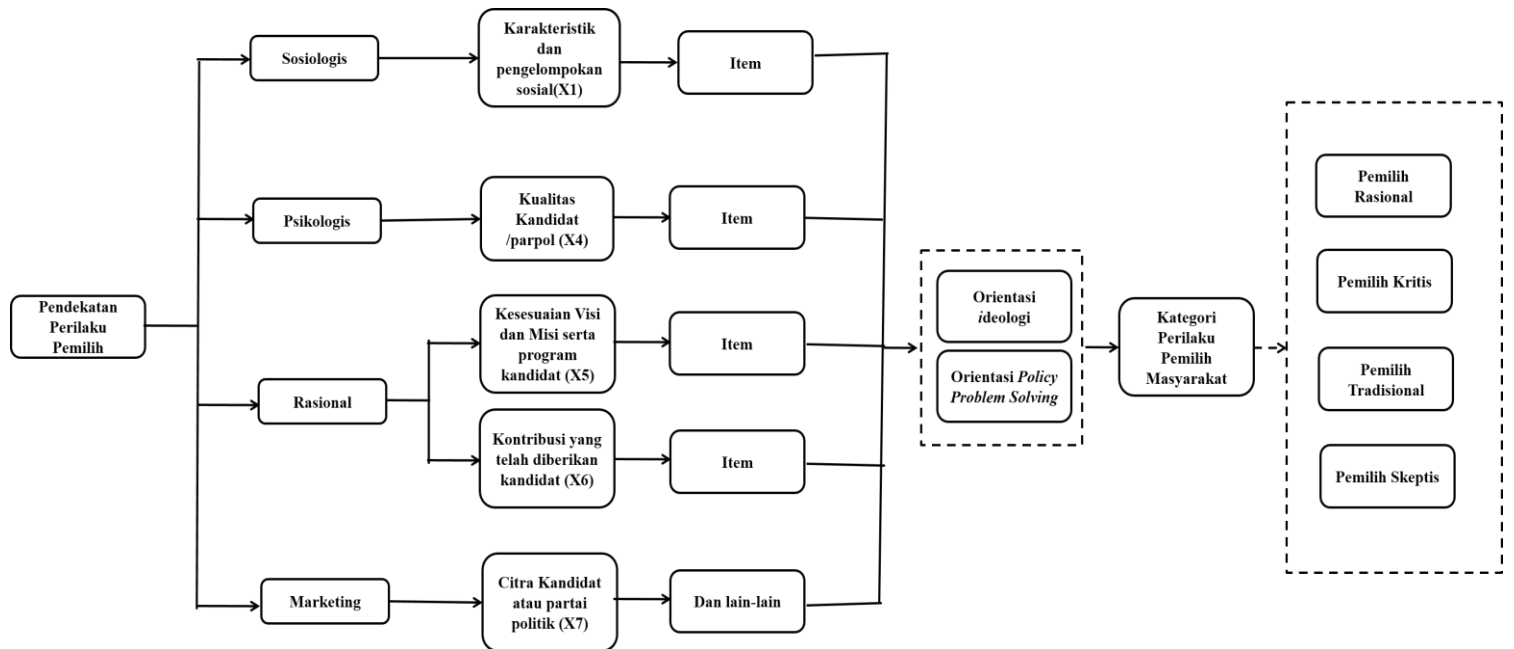
3. Pemilih Tradisional

Item-item yang menjadi pertimbangan dalam kategori jenis perilaku pemilih tradisional adalah item dengan rata-rata tertinggi dengan item tertinggi tersebut masuk dalam kelompok pemilih yang berorientasi pada ideologi

4. Pemilih Apatis

Item-item yang menjadi pertimbangan dalam kategori jenis perilaku pemilih apatis adalah item dengan rata-rata tertinggi dengan item tertinggi tersebut masuk dalam kelompok pemilih yang berorientasi pada ideologi tetapi lebih cenderung pada item yang tertinggi adalah item janji atau program atau kebijakan yang akan dilaksanakan kandidat jika terpilih memberikan manfaat bagi pemilih maupun lingkungan pemilih dan item memilih kandidat karena kandidat telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih.

Adapun lebih jelasnya terkait alur pikir penelitian ini, berikut gambar bagan alur pikir penelitian berdasarkan penjelasan di atas:



Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber, 2014.